

---

## **IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN EFISIENSI PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM**

**Astrid Indah Maretha Dewi<sup>1)</sup>, Andina Uyuni Aulia<sup>2)</sup>, Afriadin<sup>3)</sup>, Sri Uswatun Hasana Mang<sup>4)</sup>, Nurul Aulia<sup>5)</sup>, Arif Saputra<sup>6)</sup>, Lalu Andre Arya P<sup>7)</sup>, Muhamad Hendra<sup>8)</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>**Universitas Muhammadiyah Mataram**

<sup>1)</sup>[astridindah24gmail.com](mailto:astridindah24gmail.com), <sup>2)</sup>[andinauyunia@gmail.com](mailto:andinauyunia@gmail.com), <sup>3)</sup>[afriadin54736@gmail.com](mailto:afriadin54736@gmail.com),  
<sup>4)</sup>[sriuswatunhasanamang12@gmail.com](mailto:sriuswatunhasanamang12@gmail.com), <sup>5)</sup>[nurulaulia250703@gmail.com](mailto:nurulaulia250703@gmail.com),  
<sup>6)</sup>[arifsyaputra434@gmail.com](mailto:arifsyaputra434@gmail.com), <sup>7)</sup>[luandree2003@gmail.com](mailto:luandree2003@gmail.com), <sup>8)</sup>[bmhendra55@gmail.com](mailto:bmhendra55@gmail.com)

**Abstract:** *Waste management in Mataram City is a complex challenge, especially with a daily waste volume reaching 500 tons, while its management capacity can only handle 70%. This condition causes most of the waste to be dumped in a landfill that is almost full. This study evaluates the implementation of good governance principles, such as community participation, transparency, accountability, law enforcement, multi-party collaboration, technological innovation, and sustainability in waste management by the Mataram City Environmental Service. The findings show that there is community involvement through various education programs and cooperation with the private sector. However, several obstacles are still faced, such as low environmental awareness, limited budget, inadequate infrastructure, and less than optimal cross-agency coordination. Through a qualitative descriptive approach, this study highlights the need to strengthen regulations and policy integration to improve the waste management system sustainably. This study is expected to contribute theory and practice in supporting good environmental governance to achieve sustainable development goals*

**Keywords:** *Good Governance; Waste Management; Community Participation; Mataram City; Sustainability; Environmental Governance.*

**Abstrak:** Pengelolaan sampah di Kota Mataram merupakan tantangan yang kompleks, apalagi dengan volume sampah harian yang mencapai 500 ton, sementara kapasitas pengelolaannya hanya mampu menangani 70%. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang hampir penuh. Penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, kolaborasi multipihak, inovasi teknologi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat melalui berbagai program edukasi dan kerja sama dengan pihak swasta. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran lingkungan, terbatasnya anggaran, belum memadainya infrastruktur, dan belum optimalnya koordinasi lintas instansi. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti perlunya penguatan regulasi dan integrasi kebijakan untuk meningkatkan sistem

pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori dan praktik dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Yang Baik; Pengelolaan Limbah; Peran Serta Masyarakat; Kota Mataram; Keberlanjutan; Tata Kelola Lingkungan.

## **PENDAHULUAN**

Masalah pengelolaan sampah telah menjadi tantangan global yang semakin kompleks dan mendesak, termasuk di Indonesia. Kota Mataram, yang terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, menghadapi kesulitan besar dalam mengelola sampah secara efisien. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, volume sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 500 ton, sementara kapasitas pengelolaan yang ada hanya mampu menangani sekitar 70% dari jumlah tersebut. Akibatnya, sebagian besar sampah harus dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA), yang hampir mencapai batas kapasitasnya. Situasi ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga memberikan tekanan ekonomi dan sosial yang besar kepada masyarakat setempat.

Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah semakin memperburuk kondisi ini. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat bahwa hanya sekitar 45% rumah tangga di Kota Mataram yang aktif melakukan pemilahan sampah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat menjadi salah satu faktor utama penyebabnya. Di sisi lain, terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah modern menjadi hambatan yang signifikan. Masalah ini semakin rumit dengan kurangnya kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Sebagai solusi, penerapan prinsip-prinsip good governance dinilai efektif untuk mengatasi masalah ini. Menurut UNDP (1997), konsep good governance melibatkan berbagai elemen penting seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan sampah, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif.

Namun, implementasi prinsip-prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya akuntabilitas dari pihak pengelola, dan

terbatasnya penggunaan teknologi inovatif. Survei yang dilakukan oleh Indonesian Center for Environmental Governance (ICEG) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki kebijakan pengelolaan sampah berbasis pada prinsip-prinsip good governance.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengelola sampah dengan prinsip ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya (Pasal 5). Undang-undang ini juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pendekatan terkait pengelolaan sampah, seperti penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, meskipun kurang memperhatikan aspek partisipasi masyarakat dan akuntabilitas (Purba et al., 2019). Partisipasi masyarakat memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan sampah, namun seringkali kurang mengkaji peran tata kelola pemerintahan yang baik (Suyanto & Wicaksono, 2020). Sementara itu, penelitian yang mengkaji tata kelola yang baik dalam pengelolaan sampah lebih banyak terfokus pada wilayah perkotaan besar, sehingga kurang relevan untuk kota menengah seperti Mataram (Kartika & Widodo, 2021).

Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar literatur yang ada cenderung fokus pada aspek teknis seperti teknologi pengelolaan dan dampak lingkungan, tanpa banyak mengkaji pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan good governance dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sampah, khususnya di daerah dengan tantangan dan karakteristik yang unik.

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram perlu dilihat dari dua sisi: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, dan kedua, bagaimana pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan akuntabilitas tinggi, memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Sebagai contoh, penerapan sistem

---

pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah (Sugianto, 2020).

Selain itu, pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah secara berkelanjutan. Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Kota Mataram sangat relevan dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Bappenas, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam literatur yang ada dengan mengkaji penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Kota Mataram. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang menyoroti hubungan antara partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola pengelolaan sampah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip good governance telah diimplementasikan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.

Penelitian ini juga diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu mengenai tata kelola pengelolaan sampah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini berpotensi menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembuat kebijakan tentang pentingnya implementasi tata kelola yang baik untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-11 mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan, serta tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Prinsip Good Governance**

Good governance merupakan konsep tata kelola yang sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi atau pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas yang berperan sebagai pedoman dalam menciptakan tata kelola yang berkualitas. Transparansi mengutamakan keterbukaan informasi, partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat, akuntabilitas memastikan adanya tanggung jawab atas

setiap keputusan, responsivitas menekankan pada kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat, dan efektivitas menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga menjadi landasan untuk memastikan bahwa mekanisme, proses, dan institusi yang ada memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan yang demokratis dan inklusif, hal ini menjadi sangat relevan. Tujuan utama dari penerapan good governance adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, sehingga tata kelola menjadi lebih efektif dan efisien (Abdellatif, 2003).

Lebih jauh, penerapan prinsip good governance juga memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, elemen-elemen seperti transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan akuntabilitas menjadi komponen kunci. Elemen-elemen tersebut juga relevan dalam mengelola isu-isu lingkungan, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Dalam hal ini, penerapan prinsip good governance mampu menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan (Abdellatif, 2003).

## 2. Efisiensi dalam Pengelolaan Sampah

Efisiensi dalam pengelolaan sampah adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal guna mencapai hasil yang maksimal, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya atau waktu, tetapi juga dengan dampak positif yang dapat diberikan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Pengelolaan sampah yang baik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis. Keterlibatan masyarakat, tata kelola yang efektif, dan kerja sama antar-pemangku kepentingan juga menjadi faktor yang sangat diperlukan. Pendekatan teknis, seperti pemilahan sampah, penggunaan teknologi daur ulang, dan pengelolaan limbah organik, tentu memainkan peran penting. Namun, tanpa dukungan dari masyarakat dan penerapan prinsip tata kelola yang baik, efisiensi yang diharapkan tidak akan tercapai (Yoshida & Terazono, 2010).

Beberapa aspek yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah melalui penerapan good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi memastikan bahwa informasi terkait program pengelolaan sampah dapat diakses

dengan mudah oleh masyarakat, sehingga membangun kepercayaan publik dan menciptakan keterbukaan dalam penggunaan anggaran serta implementasi kebijakan.

Akuntabilitas, di sisi lain menuntut adanya pelaporan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan mengenai hasil pengelolaan sampah. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendorong keterlibatan langsung mereka dalam berbagai aktivitas, seperti pemilahan sampah, pengurangan limbah, dan kegiatan daur ulang. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari solusi, tetapi juga teredukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan.

### 3. Implementasi Good Governance di Sektor Lingkungan

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, good governance memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip good governance menekankan perlunya kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi yang solid antara ketiga pihak ini menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan yang efektif dan inovatif.

Penerapan prinsip-prinsip good governance yang baik terbukti mampu meningkatkan efektivitas berbagai program lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Dengan adanya good governance, tata kelola yang terstruktur dapat membantu mengelola tanggung jawab masing-masing pihak secara lebih efisien. Di tingkat lokal, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi strategi penting untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam pengelolaan lingkungan, termasuk potensi konflik kepentingan antar-pihak yang terlibat (Ardianto et al., 2022).

Tata kelola yang baik dapat mendukung munculnya inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Inovasi ini dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi (Asaduzzaman et al., 2023). Dengan adanya inovasi, pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pada akhirnya, implementasi good governance tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang positif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi Penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Jl. Sandubaya No.86, Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83236 dengan jumlah

responden 1, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram yaitu Bapak Irwansyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi serta untuk menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang relevan.

Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sampah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem pengelolaan sampah di Kota Mataram (Creswell, 2014). Fokus penelitian ini adalah untuk memahami praktik yang berlangsung di lapangan serta dampaknya terhadap kelangsungan pengelolaan sampah.

Sumber Data, Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari informan kunci, yang meliputi pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, pengelola sampah, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sampah, laporan tahunan, Menelaah Video serta data statistik terkait pengelolaan sampah yang disediakan oleh instansi pemerintah.

Cara Pengambilan Data, Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam pengelolaan sampah. Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan observasi partisipatif, yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati proses pengelolaan sampah serta penerapan prinsip good governance. Di samping itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang relevan.

Teknik Pengecekan Keabsahan Data Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang dikumpulkan (Moleong, 2017). Selain itu, teknik member checking juga



diterapkan untuk memverifikasi temuan yang diperoleh dengan meminta konfirmasi dari beberapa informan guna memastikan akurasi dan kejelasan data yang terkumpul

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Mataram**

1. Partisipasi Masyarakat, Prinsip partisipasi tercermin dalam upaya melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat diharapkan untuk memilah sampah di sumbernya dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa aksi nyata seperti gotong royong atau membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga melalui kontribusi finansial seperti iuran sampah yang dikenakan kepada rumah tangga untuk mendukung sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selain itu, adanya keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan program seperti "Lisan To School" yang mengedukasi generasi muda, menunjukkan komitmen untuk menciptakan kesadaran lingkungan sejak dini.
2. Transparansi, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Melalui platform media sosial seperti Facebook dan Instagram, DLH secara transparan mengkampanyekan isu-isu terkait pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik, termasuk memberikan informasi praktis kepada masyarakat tentang alternatif ramah lingkungan. Kampanye ini menunjukkan upaya transparansi dalam menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.





**Gambar 1 dan 2 Kegiatan Gotong Royong**

3. Akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pengelolaan sampah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Program iuran sampah yang dikenakan kepada rumah tangga menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendanai sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selain itu, kegiatan seperti "Istana Maggot" (Mataram Maggot Center) yang mengelola sampah organik dengan menggunakan larva lalat tentara hitam (BSF) juga memperlihatkan akuntabilitas dalam mengelola sampah secara efektif dan menghasilkan produk yang berguna.
4. Penegakan Hukum, Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan sampah juga terlihat dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh DLH. Perda tentang pengelolaan sampah mengatur kewajiban masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri, termasuk memilah sampah dari sumbernya dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Penegakan hukum ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. adapun UU yang Mengatur Pengelolaan Sampah yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Mengatur bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara

yang berwawasan lingkungan. Selain itu, UU ini juga melarang membuang sampah sembarangan. dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: Mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.

5. Kolaborasi Multi-Pihak, Salah satu prinsip good governance yang diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Mataram adalah kolaborasi antar berbagai pihak. Proses perumusan kebijakan pengelolaan sampah melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat melalui forum-forum kolaboratif yang melibatkan komunitas peduli lingkungan, kepala lingkungan, lurah, camat, serta organisasi masyarakat lainnya. Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Program-program seperti "Istana Maggot" yang melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) juga menunjukkan pentingnya peran sektor masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6. Inovasi dan Teknologi, DLH Kota Mataram tidak hanya mengandalkan kebijakan tradisional dalam pengelolaan sampah, tetapi juga mengadopsi inovasi dan teknologi. Penggunaan teknologi seperti bio-gas rumahan untuk mengolah sampah organik menjadi energi terbarukan di wilayah Rembiga adalah contoh nyata penerapan prinsip inovasi dalam pengelolaan sampah. Teknologi ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan ramah lingkungan.
7. Keberlanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Melalui program seperti daur ulang sampah menjadi produk berguna (seperti pupuk kompos, batako, dan magon untuk ternak), Kota Mataram mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sampah. Ini bukan hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang sebelumnya dianggap sebagai limbah. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.



**Gambar 3 dan 4**  
**Proses Pengelolaan Pupuk Organik**

### **Faktor Penghambat Penerapan Prinsip good governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Mataram**

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Mataram menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Faktor-faktor penghambat ini meliputi aspek sosial, ekonomi, dan teknis yang saling terkait, yang dapat memperlambat pencapaian tujuan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa faktor yang menghambat tersebut:

#### **1. Minimnya Partisipasi Masyarakat**

Meskipun partisipasi merupakan salah satu pilar utama Good Governance, masih ada hambatan untuk mendorong masyarakat agar lebih terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Di kawasan perkotaan seperti Kota Mataram, tantangan utamanya adalah gaya hidup individualis dan mobilitas yang tinggi, yang membuat masyarakat lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada masalah bersama, seperti pengelolaan sampah. Hal ini menyulitkan terciptanya kesepakatan kolektif dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Di daerah pinggiran, meskipun ada potensi gotong-royong yang kuat,

terbatasnya akses informasi dan infrastruktur menghalangi pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah.

Kesadaran Lingkungan yang Rendah Kesadaran lingkungan yang rendah di kalangan sebagian besar masyarakat menjadi penghambat utama bagi pengelolaan sampah yang efektif. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, bahkan ke sungai, yang mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Perubahan perilaku dalam membuang sampah dengan cara yang bertanggung jawab memerlukan waktu serta edukasi yang berkelanjutan. Meskipun program-program seperti Lisan To School dan penggunaan tas belanja ramah lingkungan bertujuan untuk membangun kesadaran lingkungan, tingkat kesadaran tersebut belum tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Penggunaan teknologi canggih dan inovasi dalam pengelolaan sampah, seperti bio-gas rumahan dan pengolahan sampah organik, memerlukan tenaga kerja terampil serta infrastruktur yang memadai. Di beberapa daerah, terutama di wilayah pinggiran, keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur menghalangi kelancaran implementasi program tersebut. Teknologi pengelolaan sampah yang lebih maju, seperti penggunaan maggot untuk pengolahan sampah organik, sulit diterapkan secara luas tanpa dukungan pelatihan dan fasilitas yang memadai.

3. Keterbatasan Pendanaan

Untuk mengelola sampah secara efektif, diperlukan dana yang cukup besar, baik untuk operasional maupun pengembangan program-program yang melibatkan masyarakat. Meskipun ada kontribusi finansial dari masyarakat melalui iuran sampah, jumlahnya belum mencukupi untuk mendukung pengelolaan sampah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sering kali, keterbatasan dana menjadi kendala dalam pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat secara intensif.

4. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Meskipun sudah ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur kewajiban pengelolaan sampah, kurangnya koordinasi antar lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan sektor swasta, menghambat penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Kurangnya integrasi antara pemerintah dan

masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif antar berbagai pihak.

5. Lemahnya Penegakan Hukum

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, penerapan hukum yang lemah tetap menjadi hambatan dalam penerapan prinsip Good Governance. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, seperti pembuangan sampah sembarangan, menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada. Penegakan hukum yang lebih tegas, misalnya dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, diperlukan untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan adanya praktik good governance dimana Implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Mataram telah menunjukkan hasil positif, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat, transparansi melalui kampanye edukasi, akuntabilitas dalam pengelolaan iuran sampah, serta penerapan teknologi inovatif dalam pengolahan sampah organik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga terlihat menciptakan sinergi yang baik dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, termasuk rendahnya kesadaran lingkungan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, kurangnya dana, serta koordinasi antar lembaga dan penegakan hukum yang lemah. Hambatan-hambatan ini menghalangi tercapainya efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, dan Strategi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, E. (2020). *Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.
- Ardianto, R., Saputra, H., & Wahyuni, S. (2022). The Role of Good Governance in Managing Urban Waste. *Journal of Environmental Studies*, 17(4), 245-260.
- Asaduzzaman, M., Alam, S., & Habib, A. (2023). Governance Challenges in Urban Waste Management: A Global Perspective. *Sustainability Science*, 18(1), 65-80.
- Kartika, N. A., & Widodo, T. (2021). "The Role of Governance in Sustainable Waste Management." *International Journal of Public Policy and Administration*, 12(3), 89-105.
- Purba, F. D., Sahlan, M., & Pratama, R. A. (2019). "Innovation in Waste Management: Challenges and Opportunities." *Journal of Environmental Management*, 231, 42-50.
- Raharjo, S., et al. (2021). "Sustainable Waste Management: Integrating Governance and Technology." *Waste Management and Research*, 39(8), 1345-1358.
- Sugianto, A. (2020). "Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia." *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 14(2), 112-120.
- Suyanto, H., & Wicaksono, T. (2020). "Community Participation in Waste Management: A Case Study in Indonesia." *Sustainable Development Journal*, 15(2), 120-132.
- Yoshida, H., & Terazono, A. (2010). Municipal Solid Waste Management in Asia and the Pacific. *Environmental Engineering Research*, 15(3), 115-125.
- Abdellatif, A. M. (2003). *Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development*. UNDP Global Programme on Governance.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Data Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Indonesian Center for Environmental Governance (ICEG). (2022). *Annual Report: Local Government Waste Management Practices*. Jakarta: ICEG.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP Policy Document.
- World Bank. (2020). *Improving Municipal Solid Waste Management in Developing Countries*. Washington, DC: World Bank.